

PERUBAHAN HIRARKI KOTA MENENGAH DI PULAU JAWA

oleh
Su Ritohardoyo & Rafeal Murতোমো*

INTISARI

Penulisan ini merupakan hasil penelitian perubahan hirarki kota di seluruh pulau Jawa dari tahun 1980-1990. Tujuan penelitian mengkaji besarnya peringkat perubahan hirarki kota atas dasar jumlah penduduk, dan menghitung peringkat kota atas dasar luas lahan perkotaan tahun 1980. Disamping itu penelitian bertujuan menghitung luas lahan perkotaan tahun 1990. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data sekunder, dibantu dengan teknik analisis data statistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep peringkat (hirarki) wilayah perkotaan menurut Zipf, di Indonesia (terutama di Jawa) secara umum tidak sesuai lagi. Ketidaksiharian sebagai akibat adanya kecenderungan di beberapa wilayah perkotaan memiliki jumlah penduduk yang hampir sama, kecuali di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat perbedaan yang sangat nyata antara peringkat wilayah perkotaan daerah kotamadya, dengan wilayah perkotaan di daerah kabupaten. Besarnya peringkat wilayah perkotaan menurut luas lahan kota tidak memiliki perbedaan yang nyata, dengan peringkat wilayah perkotaan menurut jumlah penduduk perkotaan. Secara umum dapat dikemukakan bahwa makin tinggi peringkat perkotaan menurut jumlah penduduk, maka makin tinggi pula peringkat perkotaan menurut luas lahan kotanya. Walaupun pengaruh laju pertumbuhan penduduk (baik dalam jiwa maupun rumah tangga) terhadap perubahan peringkat wilayah perkotaan di setiap kota di Jawa tidak cukup kuat, tetapi laju pertumbuhan rumah tangga lebih tinggi, dari pada pengaruh pertumbuhan penduduk dalam jumlah jiwa. Perkembangan penduduk perkotaan di Jawa, pada dasarnya mencerminkan perkembangan wilayah perkotaan setiap kota di Jawa. Walaupun tidak menampilkan pola yang jelas, perubahan peringkat wilayah perkotaan selama tahun 1980-1990, menunjukkan perkembangan wilayah perkotaan di pantai Utara Jawa. Perkembangan ini terjadi di wilayah-wilayah pinggiran kota-kota besar dan koridor yang

* Staf pengajar Jurusan PPW Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

menghubungkan kota-kota besar. Kenyataannya ini memberikan gambaran bahwa pada hakekatnya telah terjadi transformasi pemukiman di Jawa.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Wilayah perkotaan (urban) di Indonesia dalam kebijakan pengembangannya telah digariskan dan disusun oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya sejak tahun 1985. Namun demikian, selama kurun 1985 hingga 1990 terdapat beberapa kota berkembang dengan pesat, dan dalam kebijakan tersebut belum terdapat antisipasinya. Oleh karenanya, penentuan prioritas pengembangan wilayah kota perlu dikaji kembali. Dalam penentuan prioritas pengembangan kota, banyak faktor yang diperlukan sebagai pertimbangan. Faktor ini antara lain adalah potensi fisik, dan sosial ekonomi, termasuk potensi penduduk. Hal ini bukan berarti pengembangan wilayah perkotaan harus selalu mendasarkan atas pertimbangan semua faktor secara bersama-sama tetapi bergantung pada konteks variasi karakteristik wilayah.

Perkembangan wilayah kota dalam kebijakan yang telah direncanakan dan sebagian dilaksanakan, sering dipandang sebagai gejala lokal (internal), padahal gejala yang ditunjukkan selama 10 tahun terakhir, memperlihatkan bahwa perkembangan kota-kota tersebut tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sosial-ekonomi daerah lainnya. Oleh karenanya, perlu kajian peranan dan fungsi wilayah perkotaan dalam kaitannya dengan kebijakan pengembangan perkotaan Indonesia.

Ditinjau dari potensi dan kebutuhan pengembangan wilayah perkotaan secara umum, atas dasar indikator laju pertumbuhan penduduk perkotaan selama 10 tahun, wilayah kota di luar Jawa memiliki potensi dan perlunya pengembangan lebih tinggi dari pada di Jawa. Hal ini mengingat pertumbuhan penduduk di luar Jawa lebih tinggi dari pada di tingkat nasional, yakni 5,36 persen per tahun. Dengan demikian terlihat bahwa tuntutan untuk pengembangan kota di luar Jawa, harus memperoleh prioritas.

Pertumbuhan penduduk perkotaan setiap propinsi di Jawa menunjukkan variasi, di Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 7,78 persen dan 7,86 persen, di Jawa Timur dan Jawa Tengah sebesar 4,54 persen dan 4,93 persen, sedangkan di DKI Jakarta hanya 3,08 persen (BPS, 1990). Pada dasarnya, pengembangan wilayah kota tidak harus selalu didasarkan pada pertimbangan pertumbuhan maupun besarnya jumlah penduduk dan ekonomi semata. Namun dalam kasus perkembangan kota dan wilayah kota di pulau Jawa, pertimbangan besarnya jumlah penduduk masih cukup relevan, mengingat perubahan-perubahan fisik wilayah kota maupun perubahan batas administratif wilayah kota banyak terjadi. Disamping itu, perkembangan wilayah kota perlu ditinjau bukan semata-mata perkembangan wilayah kota secara individu, namun ditinjau dari dua atau lebih wilayah kota yang secara fisik menunjukkan kecenderungan bersatu.

Sehubungan dengan pentingnya tinjauan perkembangan suatu kota terkait dengan kota-kota lainnya, maka kajian yang menekankan pada hirarki wilayah perkotaan menengah beserta perubahannya, cukup relevan untuk dilaksanakan. Hirarki kota adalah suatu urutan peringkat kota atas dasar ukuran peranan dan fungsi kota, dalam kaitannya dengan kota-kota lainnya. Asumsi dasar yang digunakan, adalah bahwa pertumbuhan wilayah kota tidak terjadi secara acak, namun tumbuh

dalam urutan yang logis, sehingga baik ukuran maupun fungsi, berkaitan dengan keteraturan menyeluruh. Kaitan seperti ini, pertama kali dikemukakan oleh Auerbach pada tahun 1913 (Hammond, 1985), namun belum dinyatakan dalam bentuk matematik. Secara matematis, ukuran tersebut dikemukakan oleh Zipf (1949) dalam bentuk ukuran peringkat yang dalam konsepnya dinyatakan :

"Jika semua permukiman di suatu wilayah diperingkatkan berdasarkan pada urutan jumlah penduduk yang semakin kecil, maka jumlah penduduk kota ke n akan sebanyak $1/n$ jumlah penduduk yang tersebar".

Dengan kata lain, dalam suatu wilayah kota yang memiliki peranan dan fungsi (peringkat) tertinggi, adalah kota yang mempunyai jumlah penduduk kota terbanyak. Kota peringkat ke dua, dalam wilayah tersebut akan memiliki setengah dari jumlah penduduk kota pada peringkat pertama. Kota peringkat ke tiga, memiliki jumlah penduduk sebanyak sepertiga dari jumlah penduduk wilayah kota peringkat pertama, dan seterusnya.

Permasalahan Penelitian

Khusus wilayah kota-kota di Jawa, dalam menentukan prioritas pengembangan, secara umum berdasarkan pada peningkatan kebutuhan penduduk, akibat pertumbuhan penduduk perkotaan. Selain itu perkembangan kota secara fisik sudah banyak melampaui areal lahan perkotaan administratif. Hal ini memungkinkan tidak tepatnya terapan konsep hirarki kota, dan memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan hirarki kota-kota di Jawa.

Oleh karenanya, penelitian ini bertolak dari tiga permasalahan utama :

- a. perkembangan wilayah kota selama ini masih diasumsikan sebagai akibat semakin meningkatnya jumlah penduduk, pada hal perubahan-perubahan fisik wilayah kota maupun perubahan batas administratif wilayah kota banyak terjadi,
- b. perkembangan wilayah kota seringkali ditinjau semata-mata dari perubahan kota secara individu, pada hal banyak terjadi perubahan wilayah kota yang secara fisik maupun sosio-ekonomik. keterkaitan antara lebih dari satu kota yang menunjukkan kecenderungan bersatu,
- c. Masalah lain yang sering muncul adalah terapan suatu konsep dari negara-negara Barat, sering tidak sesuai dengan kondisi lokal jika diterapkan tanpa modifikasi.

Walaupun tiga permasalahan di atas perlu dicarikan pemecahannya, tetapi dalam kajian ini lebih menekankan pada uji coba penerapan konsep di atas. Hal ini penting mengingat berbagai perubahan jumlah penduduk, maupun perubahan administratif, dan fisik wilayah kota selama kurun 1980-1990 beberapa kota di Jawa sangat mencolok. Selain itu, perubahan luas lahan perkotaan untuk kota-kota di Jawa, belum diketahui dan belum tersedia datanya walaupun secara tentatif. Oleh karenanya, penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana hirarki atau peringkat wilayah perkotaan berdasarkan jumlah penduduk perkotaan di setiap daerah propinsi pada tahun 1980 dan tahun 1990, apakah konsep hirarki masih dapat diberlakukan, atau tidak dapat diberlakukan sama sekali ?
2. Seberapa besar perubahan peringkat setiap wilayah kota menurut jumlah penduduk perkotaan di setiap propinsi, dari tahun 1980 hingga tahun 1990 ?

3. Bagaimana peringkat wilayah perkotaan berdasarkan luas lahan perkotaan tahun 1980 di setiap daerah propinsi, apakah searah dengan peringkat kota menurut jumlah penduduk perkotaan ?
4. Seberapa besar hubungan antara jumlah penduduk perkotaan tahun 1980, dengan luas lahan perkotaan tahun 1980 di setiap propinsi ?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini lebih menekankan perhatian pada tujuan untuk mengkaji perubahan peringkat kota, yang secara rinci mengukur :

1. peringkat kota menurut jumlah penduduk perkotaan pada setiap propinsi di Jawa pada tahun 1980 dan 1990,
2. besarnya perubahan peringkat setiap kota di Jawa dari tahun 1980 hingga tahun 1990,
3. peringkat kota menurut luas lahan kota pada setiap wilayah propinsi di Jawa untuk tahun 1980,
4. hubungan antara jumlah penduduk perkotaan dengan luas lahan perkotaan pada setiap propinsi tahun 1980.

DATA DAN METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Bahan utama untuk penelitian ini adalah data dan informasi yang telah tertuang dalam publikasi. Mengingat luasnya daerah penelitian, dan ketersediaan data yang diperlukan, maka digunakan data sekunder:

1. Jumlah penduduk perkotaan di setiap kota di Jawa tahun 1980.
2. Jumlah penduduk perkotaan di setiap kota di Jawa tahun 1990.
3. Luas lahan perkotaan beserta bentuk-bentuk penggunaannya untuk setiap kota di Jawa tahun 1980.
4. Data lain yang berkaitan dengan perkotaan

Data kependudukan tersebut telah dirinci menurut desa kota, diperoleh dari publikasi yang dikeluarkan Biro Pusat Statistik Jakarta (1980, Seri S nomor 12, 13, 14 dan 15), berjudul Penduduk Propinsi Hasil Sensus Tahun 1980. Selain itu, data diambil dari publikasi dengan judul Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk Tahun 1990.

Data luas penggunaan lahan perkotaan di setiap kota, diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional, yang tertuang dalam buku Penggunaan Tanah Kecamatan Kabupaten/Kotamadya di Indonesia (1978-1980) dikeluarkan tahun 1986. Disamping itu, data diambil dari Penggunaan Tanah Kota I, Publikasi No.315 tahun 1984, dari Badan Pertanahan Nasional. Data luas setiap bentuk penggunaan lahan perkotaan di setiap wilayah kabupaten ataupun kotamadya di Jawa tahun 1980, disamping bersumber pada dua publikasi di atas, juga dihitung dari peta publikasi BPS, yang digunakan untuk membedakan penduduk perkotaan dari penduduk pedesaan, dalam Sensus Penduduk Tahun 1980. Oleh karenanya, keandalan data luas penggunaan lahan kota tahun 1980 masih dapat dipertanggungjawabkan.

Data lain yang berkaitan dengan obyek penelitian berupa informasi, hasil pembahasan, dan hasil-hasil penelitian, diambil dari berbagai sumber, baik dari publikasi ilmiah, maupun makalah seminar dan lokakarya. Demikian pula buku teks mengenai permukiman dan penggunaan lahan sebagai sumber acuan.

Metode Penelitian

Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa penelitian ini memanfaatkan data sekunder. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan data sekunder antara lain ketersediaan data, kebenaran data, dan cara pemanfaatan data. Ketersediaan data sekunder memberikan kesempatan untuk menganalisis data tersebut, sesuai dengan tujuan penelitian. Kebenaran data diperhatikan untuk menghindari kesalahan yang mungkin terdapat pada data, serta ketepatan waktu. Hal ini berkaitan dengan cara pemanfaatan data, dimana untuk data lama (tahun 1980 misalnya) hanya dapat digunakan untuk menjelaskan kondisi tahun tersebut. Oleh karenanya, pengumpulan data dalam penelitian ini, disamping memperhatikan kebenaran data, juga memperhatikan ketepatan waktu, untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian.

Dalam menganalisis data hasil penelitian digunakan analisis statistik. Untuk mencapai tujuan pertama, kedua, dan ke tiga menggunakan uji beda dua rata-rata yakni uji z dan untuk perbedaan yang lebih dari dua rata-rata (lebih dari dua propinsi), maka digunakan analisis varians. Tujuan penelitian ke empat dicapai menggunakan teknik analisis statistik koefisien korelasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peringkat Kota Menurut Jumlah Penduduk

Berdasarkan data hasil sensus penduduk 1980 dan 1990, terutama jumlah penduduk perkotaan dilakukan perhitungan besarnya peringkat wilayah perkotaan (urban) di setiap Kabupaten di Jawa. Walaupun wilayah kotamadya telah dianggap sebagai wilayah kota yang sesungguhnya, atau pusat-pusat perkotaan (*urban centres*), tetapi dalam kenyataannya masih memiliki penghuni yang bersifat pedesaan. Oleh karenanya dalam pembahasan ini masih dilakukan analisis, untuk memahami di bagian wilayah mana yang selama sepuluh tahun mengalami perkembangan seperti itu, apakah karena ketersediaan lahan yang masih cukup besar, atau terdapat faktor lain sebagai penyebab terjadinya perubahan pemusatan penghuni wilayah perkotaan.

Kenyataan memperlihatkan bahwa setiap wilayah propinsi, wilayah perkotaan yang berperingkat pertama, belum tentu berpenduduk perkotaan dua kali lipat wilayah perkotaan yang ke dua. Bahkan selanjutnya wilayah perkotaan ke tiga, ke empat dan seterusnya, juga belum tentu memiliki peringkat semakin kecil mengikuti urutan jumlah penduduk perkotaannya.

Kasus-kasus wilayah propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan propinsi Jawa Timur, memperlihatkan bahwa peringkat wilayah perkotaan tidak lagi membentuk pola berurutan secara teratur mengikuti besarnya jumlah penduduk.

Sejak tahun 1980 hingga 1990, peringkat wilayah perkotaan membentuk pola-pola mengelompokkan dengan urutan yang berselang (meloncat) tidak teratur.

Tampaknya untuk propinsi Jawa Barat, wilayah perkotaan di setiap kabupaten memiliki pola agihan peringkat yang menyebar. Disamping itu, tampak adanya ketidak-urutan peringkat, dari peringkat terendah ke peringkat yang semakin tinggi memiliki julat (*range*) yang sangat besar. Dalam agihan tersebut tampak bahwa semakin jauh setiap lokasi wilayah kabupaten dari kotamadya, memiliki peringkat semakin kecil (angka peringkat besar). Keadaan seperti itu tidak hanya terjadi pada tahun 1980, tetapi sepuluh tahun kemudian (1990) pun masih memiliki pola yang hampir sama.

Demikian pula di Propinsi-propinsi lain seperti Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur, pola agihannya mirip dengan yang terjadi di Jawa Barat. Kenampakan seperti ini, memberikan gambaran bahwa pada dasarnya hampir di setiap wilayah kabupaten ataupun kotamadya, perkembangan jumlah penduduk perkotaan semakin meningkat dengan tingkat yang hampir sama.

Wilayah-wilayah perkotaan pada kelompok peringkat atas (satu, dua, dan tiga), jumlahnya lebih sedikit dari pada jumlah wilayah perkotaan di peringkat bawah. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa penerapan konsep peringkat (dari Zipf) wilayah perkotaan di Indonesia (terutama di Jawa) tidak cukup kuat. Hal ini disebabkan terdapat kecenderungan di berbagai wilayah perkotaan yang hampir berbeda di Jawa, memiliki jumlah penduduk perkotaan yang hampir sama. Selain itu, terdapat wilayah perkotaan yang berpenduduk jauh lebih kecil dari pada wilayah perkotaan pusat, sehingga mengakibatkan kesenjangan peringkat yang tidak berurutan.

Rata-rata peringkat wilayah perkotaan kotamadya dan rata-rata wilayah perkotaan kabupaten, secara umum terdapat perbedaan. Di propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan propinsi Jawa Timur, hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata peringkat wilayah perkotaan kabupaten berkisar antara 11,5 hingga 29,39, dan kotamadya berkisar antara 5,31 hingga 13,97 pada tahun 1980. Rata-rata peringkat tersebut pada tahun 1990 mengalami perubahan menjadi 7,47 hingga 26,79 untuk kabupaten, sedangkan untuk kotamadya berkisar antara 5,04 hingga 14,02 (Tabel 1). Kenyataan ini menunjukkan bahwa pada dasarnya dominasi sifat wilayah perkotaan kotamadya belum begitu kuat (peringkatnya masih > 1), dalam arti di kotamadya masih terdapat wilayah pedesaan, dan wilayah kabupaten terdapat wilayah perkotaan semakin meningkat.

Namun di D.I. Yogyakarta, dominasi sifat perkotaan kotamadya masih sangat kuat (peringkat = 1), sedangkan peringkat rata-rata wilayah perkotaan kabupaten sebesar 12,47 pada tahun 1980. Pada tahun 1990 peringkat kotamadya bergeser turun menjadi 1,02 sedangkan wilayah perkotaan kabupaten meningkat menjadi 7,65 (Tabel 1). Hal ini memperlihatkan bahwa atas dasar jumlah penduduk perkotaan, di antara kedua wilayah (kabupaten dan kotamadya) sangat berbeda.

Perubahan Peringkat Kota Menurut Jumlah Penduduk

diperhatikan dari sisi besarnya peringkat wilayah perkotaan di setiap kabupaten maupun kotamadya, selama sepuluh tahun terakhir telah banyak mengalami perubahan. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa wilayah-wilayah kota yang

berfungsi sebagai ibukota propinsi atau kotamadya (Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya), pada tahun 1980 masih menunjukkan sebagai pemusatan penduduk. Namun pada tahun 1990 peringkat tersebut di wilayah-wilayah tertentu memperlihatkan bahwa peringkat pertama dan terakhir dari setiap wilayah perkotaan, di setiap propinsi, dan daerah istimewa mengalami pergeseran.

Tabel 1. Perbedaan antara Peringkat Wilayah Perkotaan Menurut Jumlah Penduduk Perkotaan Kotamadya dengan Kabupaten

No.	Propinsi	Tahun 1980		Tahun 1990	
		Kabupaten	Kotamadya	Kabupaten	Kotamadya
1	Jawa Barat	14,48	6,69	10,67	8,41
	\bar{X}	12,34	4,38	9,37	4,65
	Sd_x	20	4	20	4
	n	0,715		0,461	
	t_h	1,717		1,717	
	Perbedaan	Tidak nyata		Tidak nyata	
2	Jawa Tengah	11,50	5,31	7,47	5,04
	\bar{X}	6,62	3,08	3,93	3,24
	Sd_x	29	6	29	6
	n	2,221		1,413	
	t_h	1,96		1,96	
	Perbedaan	Cukup nyata		Tidak nyata	
3	Jawa Timur	29,39	13,97	26,79	14,02
	\bar{X}	23,84	8,25	30,0	7,89
	Sd_x	29	8	29	8
	n	1,733		1,182	
	t_h	1,96		1,96	
	Perbedaan	Tidak nyata		Tidak nyata	
4	D.I. Yogyakarta	12,47	1	7,65	1,02
	\bar{X}	7,72	1	6,64	1
	Sd_x	4	1	4	1
	n	2,979		1,997	
	t_h	1,638		1,638	
	Perbedaan	Cukup nyata		Cukup nyata	

Sumber : Analisis Data Sekunder

Secara umum jumlah penduduk perkotaan tahun 1980 hingga 1990, terjadi peningkatan di setiap wilayah kabupaten di Jawa. Hal itu berakibat pada perubahan peringkat wilayah perkotaan di kotamadya maupun kabupaten. Hasil penelitian menunjukkan besarnya rata-rata peringkat wilayah perkotaan tahun 1980 adalah 15,023, dengan simpangan baku sebesar 13,226. Untuk tahun 1990 besarnya rata-rata peringkat wilayah perkotaan tersebut meningkat menjadi 11,991, dengan simpangan

dengan simpangan baku sebesar 11,626. Dengan demikian besarnya rata-rata perubahan peringkat wilayah perkotaan selama sepuluh tahun adalah 3,032, dengan simpangan baku sebesar 1,7. Mendasarkan pada angka rata-rata perubahan peringkat ini, disusun tingkat perubahan peringkat, menggunakan angka 3 sebagai batas nilai tinggi rendahnya kenaikan ataupun penurunan peringkat wilayah perkotaan, sebagai berikut.

1. Jika suatu wilayah perkotaan baik kabupaten maupun kotamadya, memiliki perubahan lebih besar dari 3, dikategorikan sebagai wilayah dengan perubahan tinggi atau di atas rata-rata.
2. Jika suatu wilayah perkotaan baik kabupaten maupun kotamadya, memiliki perubahan peringkat kurang atau sama dengan 3, dikategorikan sebagai wilayah dengan perubahan rendah atau di bawah rata-rata.

Dengan menggunakan kriteria di atas, dapat diketahui bahwa sebagian terbesar yakni 78 wilayah perkotaan (73,6 persen) mengalami perubahan peringkat secara meningkat (angka perubahan peringkat negatif), sedangkan sebanyak 28 wilayah (26,4 persen) mengalami perubahan peringkat menurun (angka perubahan positif). Ditinjau dari besarnya angka perubahan peringkat atau tingginya perubahan, sebagian besar atau 66 wilayah perkotaan masih di bawah rata-rata atau perubahannya rendah. Kenampakan menarik adalah wilayah perkotaan di kotamadya, tingkat perubahannya di bawah rata-rata. Justru wilayah perkotaan dengan peringkat rendah di setiap wilayah propinsi, menunjukkan perubahan peringkat yang tinggi. Hal ini merupakan gejala perkembangan cukup pesat di wilayah-wilayah tersebut. Secara rinci agihan perubahan peringkat tersebut disajikan dalam Tabel 2.

Kenyataannya ini menunjukkan, bahwa perubahan peringkat wilayah perkotaan secara keruangan antar wilayah propinsi, memiliki pola perubahan yang berbeda. Perbedaan pola perubahan tersebut terlihat antara propinsi Jawa Tengah, dan D.I. Yogyakarta, dengan dua propinsi lain yakni Jawa Barat dan Jawa Timur. Di kedua propinsi tersebut terakhir, terdapat wilayah-wilayah perkotaan dengan perubahan peringkat yang tinggi dengan angka positif (Kota Sukabumi, Pandeglang, Pacitan, Magetan, dan Lamongan). Hal itu berarti bahwa wilayah-wilayah perkotaan tersebut justru mengalami penurunan peringkat cukup tajam, dibandingkan dengan wilayah perkotaan di tingkat propinsi. Hal semacam ini tidak terjadi di tiga daerah propinsi lain, karena seperti di Jawa Tengah, dan D.I. Yogyakarta terjadi perubahan peringkat wilayah perkotaan cukup tinggi, namun perubahannya menurun yang berarti peringkatnya justru semakin besar.

Pola Persebaran Perubahan Peringkat

Kenampakan menarik terjadi di wilayah perkotaan di kabupaten-kabupaten sekitar kota besar, pada umumnya memiliki perubahan peringkat perkotaan yang lebih tinggi dari pada perubahan peringkat di kota besar itu sendiri. Beberapa wilayah seperti kabupaten :

- Bekasi, dan Tangerang yang berbatasan langsung dengan Kota Jakarta,
- Majalengka, Kuningan, dan Idramayu berbatasan langsung dengan Cirebon,
- Demak, Jepara, Rembang, Semarang, dan Batang berbatasan langsung dengan kotamadya Semarang,

- Boyolali, Sukoharjo, dan Karangayar, berbatasan langsung dengan kotamadya Surakarta,
- Bangkalan, Sumenep, Jombang, Gresik, Mojokerto, dan Sidoharjo berbatasan langsung dengan kotamadya Surabaya.

Kenyataan tersebut menunjukkan, bahwa selama sepuluh tahun terakhir, perkembangan wilayah perkotaan di sekitar kota besar maupun kotamadya cukup tinggi. Hal itu sangat wajar, karena mudah diduga bahwa perubahan perkotaan di daerah kabupaten tersebut merupakan imbas perkembangan kota, dari aspek aktivitas ekonomi, aktivitas sosial budaya, dan pertumbuhan penduduk, yang membawa akibat terhadap pertambahan bahan sarana dan prasarana fisik, serta perluasan perubahan penggunaan lahan.

Tabel 2. Agihan Perubahan Peringkat Wilayah Perkotaan di JawaTahun 1980-1990

Wilayah	Perubahan Tinggi		Perubahan Rendah	
	Menurun (+)	Meningkat (-)	Menurun (+)	Meningkat (-)
1. Propinsi Jawa Barat	1. Ka Sukabumi 3,59 2. Pandeglang 4,31	1. Majalengka -3.20 2. Tangerang -5.08 3. Bekasi -5.99 4. Indramayu -10.9 5. Kuningan -14.4 6. Lebak -22.2	1. Kd Bogor 1.54 2. Kd Bandung 0.00 3. Kd Cirebon 1.73 4. Cianjur 0.65 5. Garut 0.08	1. Bogor -1.24 2. Sukabumi -0.74 3. Bandung -0.72 4. Tasikmalaya -0.45 5. Ciamis -2,11 6. Cirebon -2.88 7. Sumedang -1.88 8. Subang -1.53 9. Purwakarta -2.45 10. Karawang -2.55 11. Serang -2.91
Jumlah	2	6	5	11
3. Propinsi Jawa Tengah		1. Banjarnegara -4.50 2. Karanganyar -4.03 3. Rembang -5.62 4. Jepara -5.94 5. Demak -20.3 6. Semarang -8.43 7. Brebes -3.99 8. Batang -5.140.53 9. Boyolali -11.4 10. Sukoharjo -3.59	1. Kd Surakarta 0.24 2. Kd Salatiga 0.20 3. Kd Semarang 0.00 4. Sragen 1.45 5. Kd Magelang 1.50	1. Kendal -2.18 2. Pekalongan -0.64 3. Pemalang -1.60 4. Tegal -1.10 5. Kd Pekalongan -1.7 6. Kd Tegal -1.79 7. Cilacap -0.28 8. Banyumas -1.12 9. Purwalingga -0.69 10. Kebumen -1.29 11. Purworejo -2.04 12. Wonosobo -1.92 13. Magelang -2.38 14. Boyolali -11.4 15. Klaten -0.44 16. Wonogiri -13.2 17. Grobogan -12.3 18. Blora -0.67 19. Pati -2.67 20. Kudus -2.11
4. Propinsi Jawa Timur		1. Kulonprogo -8,10 2. Bantul -5.08 3. Gunungkidul -3.48	1. Kd Yogyakarta 0.02	1. Sleman -2.62
Jumlah		3	1	1

Lanjutan tabel 2.				
5. Propinsi Jawa Timur	1. Pacitan 42.00 2. Magetan 7.89 3. Lamongan 4.00	1. Blitar -7.66 2. Kediri -10.9 3. Malang -3.41 4. Lumajang -4.03 5. Situbondo -3.55 6. Probolinggo -6.48 7. Sidoharjo -5.26 8. Ngawi -19.3 9. Mojokerto -22.2 10. Jombang -6.60	1. Banyuwangi 2.23 2. Madiun 0.54 3. Bojonegoro 0.18 4. Kd Kediri 0.22 5. Kd Malang 0.02 6. Kd Pobolinggo 0.69 7. Kd Madiun 2.61 8. Kd Surabaya 0.00 9. Trenggalek 0.57 10. Jember 0.35	1. Tulungagung -1.82 2. Bondowoso -2.60 3. Pasuruan -1.13 4. Sampang -2.11 5. Pamekasan -1.69 6. Kd Pasuruan -1.00 7. Kd Mojokerto -0.41 8. Kd Blitar -1.67
		11. Nganjuk -5.03 12. Tuban -5.03 13. Gresik -5.89 14. Sumenep -5.64 15. Bangkalan -3.06 16. Ponorogo -9.86		
Jumlah	3	16	10	8
Total 1,2,3,4,5 Persen	5 4,7	35 33,0	23 26,7	43 40,6

Dari segi kegiatan ekonomi kota, misalnya kegiatan industri di wilayah sekitar kota berkembang, karena fasilitas serta prasarana untuk pengembangan kegiatan terpusat di kota. Seperti diungkap Hill (1990) bahwa kota Jakarta bersama kabupaten-kabupaten di sekitarnya, merupakan penghasil 31 persen dari nilai industri nasional, yang berasal dari industri besar dan sedang. Bahkan kota-kota utama lainnya seperti Surabaya, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta, Surabaya dan Malang, sebagai pusat-pusat kegiatan industri penting, merupakan penyebab utama semakin tingginya harga lahan di kota dan wilayah sekitarnya.

Perkembangan konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah kabupaten sekitar Jakarta maupun kota-kota besar lainnya, telah menarik penduduk dari luar kota untuk bertempat tinggal menetap di wilayah tersebut. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah penduduk selama sepuluh tahun terakhir (1980-1990) yang cukup tinggi di wilayah kabupaten sekitar kota besar. Berdasarkan hasil sensus tahun 1980 dan 1990 dapat ditunjukkan bahwa di setiap wilayah kabupaten yang berdekatan dengan kota besar memiliki laju pertumbuhan penduduk per tahun cukup tinggi (Tabel 3).

Dalam tabel tersebut tampak bahwa laju pertumbuhan penduduk perkotaan kabupaten Bogor misalnya 11,67 persen, Tangerang 20,89 persen, dan Bekasi 19,84 persen per tahun, karena dekatnya dengan kota Jakarta. Demikian juga laju pertumbuhan penduduk perkotaan di kabupaten Kuningan 11,18 persen, Cirebon 10,01 persen, dan Indramayu 11,73 persen. Di propinsi Jawa Tengah seperti laju pertumbuhan penduduk perkotaan di Tegal 6,53 persen, Brebes 10,15 persen, Pemalang 6,25 persen, Batang 8,13 persen, Pekalongan 5,56 persen, sebagai akibat berdekatan dengan kotamadya Tegal dan Pekalongan. Gejala tingginya laju pertumbuhan penduduk perkotaan, ditunjukkan pula di sekitar kotamadya Semarang, dimana kabupaten Semarang sebesar 10,29 persen, Demak 13,35 persen, dan di Kendal 5,23 persen. Sama halnya dengan pola tersebut terjadi pada penduduk perkotaan di sekitar kotamadya Surakarta (periksa Tabel 8), kotamadya di propinsi Jawa Timur seperti Surabaya, Mojokerto, Malang, Kediri, Madiun, dan Probolinggo, serta di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 3. Laju Pertumbuhan Penduduk Perkotaan di Sekitar Kota Metropolitan dan Kotamadya di Jawa

Wilayah perkotaan di kabupaten	Pertumbuhan penduduk/th (%)	Peringkat Wilayah kota	Kota besar terdekat
1. Bogor	11,67	1,05	DKI
2. Tangerang	20,89	1,33	Jakarta
3. Bekasi	19,84	1,76	Kodya
4. Sukabumi	4,52	6,07	Bogor
1. Bandung	7,30	1,57	Kodya
2. Purwakarta	4,79	16,11	Bandung
3. Subang	4,56	11,96	
1. Kuningan	11,18	13,25	Kodya
2. Cirebon	10,01	9,30	Cirebon
3. Indramayu	11,73	9,19	
4. Majalengka	5,95	11,19	
1. Tegal	6,53	2,03	Kodya
2. Brebes	10,15	3,47	Tegal
3. Pemalang	6,25	3,21	Kodya
4. Batang	8,13	6,53	Pekalongan
5. Pekalongan	5,56	5,28	
1. Semarang	10,29	7,17	Kodya
2. Demak	13,35	10,88	Semarang
3. Kendal	5,23	6,06	Salatiga
1. Kudus	7,92	2,80	Kota industri
2. Japara	11,11	4,42	
3. Pati	6,03	5,73	
4. Grobogan	11,85	8,17	
1. Boyolali	11,66	7,81	Kodya
2. Sukoharjo	10,22	3,10	Surakarta
3. Karanganyar	6,93	6,74	
4. Wonogiri	11,51	9,22	
1. Sieman	14,05	1,05	Kodya
2. Bantul	20,57	1,00	Yogyakarta
1. Gresik	7,90	10,90	Kodya
2. Sidoarjo	12,20	4,11	Surabaya
3. Jombang	8,78	9,82	Kodya
4. Mojokerto	13,55	14,14	Mojokerto
1. Pasuruan	4,51	9,29	Kodya
2. Probolinggo	5,96	22,69	Probolinggo
3. Situbondo	13,55	13,71	
1. Kediri	10,69	10,97	Kodya
2. Blitar	7,44	15,84	Kediri
3. Nganjuk	8,78	14,61	Kodya
4. Ponorogo	7,32	21,42	Madiun

Kenampakan sangat menarik adalah laju pertumbuhan penduduk perkotaan di sekitar kotamadya Yogyakarta, yakni di kabupaten Sleman (14,05 persen), dan Bantul (20,57 persen). Laju pertumbuhan penduduk per tahun tersebut terbesar di antara kabupaten-kabupaten lain di Jawa. Hal ini disebabkan selama sepuluh tahun terakhir (1980-1990) di Bantul terjadi penambahan wilayah perkotaan (desa-kota) dari 7 menjadi 30 desa-kota, dan di Sleman dari 8 desa-kota menjadi 32 desa-kota. Perubahan status desa menjadi wilayah perkotaan, akibat perkembangan kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan pendidikan dan kota wisata.

Kenaikan peringkat wilayah perkotaan di sebagian besar wilayah kabupaten di Jawa, juga disebabkan kabupaten tersebut telah lama merupakan pusat kegiatan industri. Seperti di Kudus pertumbuhan penduduk 7,92 persen, Jepara 11,11 persen, dan Pati 6,03 persen, dan Kediri pertumbuhan penduduk 10,69 persen sebagai pusat industri rokok kretek di Indonesia. Disamping itu, kenaikan peringkat wilayah perkotaan dapat terjadi dengan adanya pengaruh pembangunan fisik waduk, salah satu fungsinya untuk obyek wisata. Hal ini dapat ditunjukkan dari laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi seperti di Grobogan (11,85 persen), dan Wonogiri (11,51 persen).

Walaupun tidak menampakkan pola yang jelas, perubahan peringkat wilayah perkotaan selama tahun 1980 hingga 1990, menunjukkan adanya perkembangan wilayah perkotaan di pantai Utara Jawa, mulai dari Jakarta ke arah Cirebon hingga Semarang dan Surabaya. Hal ini berbeda dari perkembangan wilayah di pantai Selatan Jawa, maupun jalur tengah pulau Jawa. Di pantai Selatan disamping keberadaan kota relatif sedikit, juga adanya kendala fisik yang berupa topografi pegunungan, merupakan alasan tidak terlihatnya perkembangan wilayah perkotaan.

Di jalur tengah Pulau Jawa, yang sebagian berupa dataran antar gunungapi, menunjukkan pola perkembangan wilayah perkotaan yang sedikit berbeda. Perubahan peringkat wilayah perkotaan seperti terjadi Bandung dan sekitarnya (Jawa Barat), Banyumas, Magelang, Boyolali, Karangayar, Sukoharjo, Grobogan dan Wonogiri (Jawa Tengah), Bantul dan Sleman (D I Yogyakarta), serta di Jawa Timur bagian tengah, yakni Ponorogo, Tulungagung, Blitar, Malang, serta kabupaten Lumajang. Di jalur tengah ini, perubahan peringkat perkotaan di samping sebagai akibat pusat-pusat kegiatan ekonomi, juga lebih banyak diakibatkan oleh peranan pusat kegiatan sosial pemerintah.

Perkembangan peringkat wilayah perkotaan ke arah melintang (Utara-Selatan) terlihat pada wilayah Jakarta-Bogor-Bandung, Tegal-Banyumas, Semarang-Yogyakarta, dan Semarang-Surakarta-Wonogiri, Surabaya-Malang, Surabaya-Madiun. Kondisi perkembangan inipun tidak terlepas dari keberadaan pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi, terutama industri dan jasa, yang terdapat di wilayah dataran pantai Utara Jawa, terutama Jakarta, Cirebon, Tegal, Semarang, dan Surabaya.

Gambaran perkembangan penduduk perkotaan di Jawa, sebenarnya juga mencerminkan perkembangan wilayah perkotaan. Secara khusus perkembangan ini terjadi di wilayah-wilayah tepi kota-kota besar dan koridor yang menghubungkan kota-kota besar. Namun demikian, kajian ini baru menghasilkan gambaran yang sifatnya sangat umum. Untuk mengenal gejala ini secara rinci diperlukan kajian-kajian empiris pada skala mikro. Secara keseluruhan hasil analisis menggambarkan transformasi permukiman di Jawa.

Peringkat Kota menurut Luas Lahan Kota Tahun 1980

Peringkat wilayah perkotaan diukur dari urutan besarnya luas lahan perkotaan pada tahun 1980, menunjukkan, bahwa wilayah yang berstatus kotamadya belum tentu menduduki peringkat tertinggi. Di antara wilayah propinsi yang terdapat di pulau Jawa, hanya Kotamadya Semarang dan Yogyakarta saja menduduki peringkat terbesar, jika diukur dari besarnya luas lahan perkotaan tahun 1980. Di Jawa Barat dan Jawa Timur, peringkat tertinggi wilayah perkotaan terdapat di kabupaten Bogor dan Kabupaten Banyuwangi.

Kenyataan tersebut memperlihatkan pula bahwa dengan menggunakan ukuran luas lahan kota, peringkat wilayah perkotaan yang tertinggi tidak didominasi kotamadya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan kotamadya sebagai pusat pelayanan, tampaknya mulai bergeser semakin kecil. Pernyataan ini dilandasi kenyataan bahwa ukuran peringkat kota menurut luas lahan kota, memperlihatkan bahwa semakin besar peringkat banyak fasilitas perkotaan yang terdapat di wilayah tersebut. Dengan adanya jumlah penduduk perkotaan semakin besar, kebutuhan fasilitas kota semakin bertambah, kebutuhan ruang atau lahan semakin besar pula sebagai tempat keberadaan fasilitas tersebut.

Tabel 4. Perbedaan antara Peringkat Kota menurut Luas Lahan Perkotaan Kotamadya dengan Kabupaten

No	Propinsi	Tahun 1980		Propinsi	Tahun 1990		
		Kabupaten	Kotamadya		Kabupaten	Kotamadya	
1	Jawa Barat	12,85	10,75	Jawa Timur	18,48	20,88	
	\bar{X}	6,84	7,08		\bar{X}	10,85	9,80
	Sd_x	20	4		Sd_x	29	8
	n	0,558			n	0,563	
	t_h	1,717			t_h	1,96	
	t_l	Tidak nyata			t_l	Tidak nyata	
Perbedaan				Perbedaan			
2	Jawa Tengah	17,76	19,17	DI Yogyakarta	2,50	1	
	\bar{X}	10,12	9,92		\bar{X}	1,12	1
	Sd_x	29	6		Sd_x	4	1
	n	0,312			n	2,679	
	t_h	1,96			t_h	1,638	
	t_l	Tidak nyata			t_l	Cukup nyata	
Perbedaan				Perbedaan			

Sumber : Analisis Data Sekunder

Pl = Peringkat menurut luas lahan perkotaan

Pp = Peringkat menurut jumlah penduduk perkotaan

Peringkat kota berdasarkan pada luas lahan perkotaannya, antara kotamadya dengan kabupaten juga tidak memperlihatkan perbedaan yang nyata, kecuali D.I. Yogyakarta (Tabel 4). Kenyataan di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata antara peringkat wilayah perkotaan kotamadya dengan

wilayah perkotaan di daerah kabupaten. Hal ini berarti bahwa pada dasarnya peringkat wilayah perkotaan antara kabupaten dan kotamadya memiliki persamaan, yang disebabkan keberadaan penduduk perkotaan menuntut tersedianya ruang atau lahan perkotaan, baik untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal (permukiman) maupun untuk tempat fasilitas kegiatan hidupnya.

Pernyataan di atas didukung hasil penelitian juga yang menunjukkan tidak adanya perbedaan yang nyata, antara rata-rata peringkat wilayah perkotaan menurut jumlah penduduk perkotaan, dengan peringkat menurut luas lahan perkotaannya pada tahun 1980 (Tabel 5). Di antara keempat wilayah propinsi yang terdapat di pulau Jawa, tidak memiliki perbedaan nyata antara peringkat wilayah perkotaan menurut luas lahan dengan peringkat kota menurut jumlah penduduk.

Dengan demikian, dapat dinyatakan antara besarnya peringkat wilayah perkotaan menurut luas lahan tidak ditentukan oleh peringkat wilayah perkotaan menurut jumlah penduduk. Kenyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa besarnya luas wilayah perkotaan, tentunya berkaitan erat dengan besarnya jumlah penduduk perkotaan yang besar, menuntut tersedianya lahan yang luas untuk memenuhi kebutuhan bertempat tinggal maupun kebutuhan tempat berdirinya bangunan fasilitas perkotaan, seperti jaringan jalan, sarana dan prasarana yang lain.

Tabel 5. Perbedaan antara Peringkat Perkotaan menurut Jumlah Penduduk Perkotaan dengan Peringkat menurut Luas lahan Perkotaan

No	Parameter	Jawa Barat		Jawa Tengah		DI Yogyakarta		Jawa Timur	
		Pl	Pp	Pl	Pp	Pl	Pp	Pl	Pp
1	x	12,50	13,181	18,0	10,437	3	10,172	19	26,054
2	Sdx	6,92	11,768	10,099	6,585	1,414	8,289	10,68	22,371
3	n	24	24	35	35		5	37	37
4		0,846		1,005		0,233		1,731	
5	tt	1,717		1,96		1,638		1,96	
6	Perbedaan	Tidak nyata		Tidak nyata		Tidak nyata		Tidak nyata	

Sumber : Analisis Data Sekunder

Hubungan Jumlah Penduduk dengan Luas Lahan

Analisis koefisien korelasi (rh) antara besarnya peringkat perkotaan menurut jumlah penduduk perkotaan dengan peringkat perkotaan menurut luas lahan perkotaan, menunjukkan bahwa (Tabel 6) besarnya koefisien korelasi di setiap propinsi bersifat negatif kuat. Besar dan sifat koefisien hubungan tersebut dapat diartikan, bahwa secara umum semakin tinggi nilai peringkat perkotaan menurut jumlah penduduk perkotaan, maka semakin besar nilai peringkat perkotaan menurut luas lahan perkotaan.

Hal ini terjadi disebabkan dua hal :

1. ukuran peringkat perkotaan menurut jumlah penduduk menggunakan ukuran relatif (rasio jumlah penduduk terhadap penduduk kota pusat propinsi, sehingga semakin besar penduduk perkotaan suatu kabupaten, semakin kecil angka peringkat),

2. peringkat perkotaan menurut lahan perkotaan menggunakan ukuran absolut, dimana semakin besar luas lahan, semakin besar peringkat kota.

Tabel 6. Persebaran Koefisien Korelasi Peringkat Kota menurut Jumlah Pendudukan dan Luas Lahan Kota

No	Parameter	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI. Yogyakarta	Jawa Timur
1	n	24	35	5	37
2	rh	-0,747	-0,787	-0,957	-0,727
3	$rt_x=5\%$	0,404	0,334	0,878	0,325
4	rh	0,558	0,619	0,951	0,529
5	Korelasi	Sangat nyata	Sangat nyata	Cukup nyata	Sangat nyata

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa besarnya koefisien korelasi (r) antara jumlah penduduk dengan luas lahan perkotaan sebesar 0,6371. Koefisien korelasi ini menunjukkan adanya hubungan positif kuat antara kedua variabel (jumlah penduduk dan luas lahan tahun 1980), pada derajat keyakinan lebih besar dari 99,99 persen ($F_{reg} = 71,04457$ dan signifikansi $F = 0,00$). Hal ini dapat dikemukakan bahwa makin besar jumlah penduduk perkotaan maka makin luas lahan perkotaannya. Namun jika ditinjau dari besarnya $r^2 = 0,40587$ yang dapat diartikan bahwa besarnya sumbangan pengaruh variabel jumlah penduduk perkotaan terhadap variabel terpengaruh (luas lahan perkotaan) hanya 40,579 persen. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terjadinya perbedaan luas lahan perkotaan antar wilayah tidak hanya dibentuk oleh jumlah penduduk saja, tetapi 59,441 persen ditentukan oleh variabel lain di luar penelitian.

KESIMPULAN

Mendasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan seperti telah diungkapkan, dapat dikemukakan secara ringkas beberapa kesimpulan berikut.

Penerapan konsep peringkat (hirarki) wilayah perkotaan menurut Zipf di Indonesia (terutama di Jawa) secara umum tidak sesuai. Ketidaksesuaian sebagai akibat adanya kecenderungan di beberapa wilayah perkotaan memiliki jumlah penduduk yang hampir sama. Disamping itu, terdapat wilayah perkotaan berpenduduk jauh lebih kecil dari pada di wilayah perkotaan pusat, sehingga berakibat terjadinya kesenjangan peringkat yang tidak berurutan teratur.

Kecuali di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat perbedaan yang sangat nyata antara peringkat wilayah perkotaan daerah kotamadya, dengan wilayah perkotaan di daerah kabupaten. Hal ini dapat dinyatakan bahwa selain di D.I. Yogyakarta, sifat wilayah perkotaan tidak hanya terdapat di daerah kotamadya yang secara administratif sebagai kota, tetapi sebagian kabupaten telah menunjukkan gejala perubahan wilayah ke arah perkotaan.

Besarnya peringkat wilayah perkotaan menurut luas lahan kota tidak memiliki perbedaan yang nyata, dengan peringkat wilayah perkotaan menurut jumlah penduduk perkotaan. Ketiadaan perbedaan ini sebagai akibat perubahan jumlah penduduk perkotaan di setiap kota, menuntut tersedianya lahan untuk tempat bermukim, dengan segala sarana dan prasarana tempat tinggal, maupun

sarana prasarana kota lainnya. Secara umum dapat dikemukakan bahwa semakin tinggi peringkat perkotaan menurut jumlah penduduk, belum tentu diikuti semakin tingginya peringkat perkotaan menurut luas lahan kotanya.

Walaupun pengaruh laju pertumbuhan penduduk (baik dalam jiwa maupun rumah tangga) terhadap perubahan peringkat wilayah perkotaan di setiap kota di Jawa tidak cukup kuat, tetapi pengaruh laju pertumbuhan rumah tangga lebih tinggi, dari pada pengaruh pertumbuhan penduduk dalam jumlah jiwa. Hal ini disebabkan walaupun tidak secara drastis, pertambahan rumah tangga berkaitan langsung dengan pertambahan kebutuhan ruang (lahan) perkotaan. Namun demikian perubahan luas lahan perkotaan secara umum, merupakan akibat besarnya lahan yang digunakan untuk aktivitas non tempat tinggal, yang lebih banyak digunakan untuk sarana dan prasarana sosial ekonomi.

Gambaran perkembangan penduduk perkotaan di Jawa, pada dasarnya mencerminkan perkembangan wilayah perkotaan setiap kota di Jawa. Walaupun tidak menampkkan pola yang jelas, perubahan peringkat wilayah perkotaan selama tahun 1980-1990, menunjukkan adanya perkembangan wilayah perkotaan di pantai Utara Jawa. Perkembangan ini terjadi di wilayah-wilayah pinggiran kota-kota besar dan koridor yang menghubungkan kota-kota besar. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa gambaran tersebut pada hakekatnya adalah transformasi pemukiman di Jawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Berry, B.J.L. and A.M. Baker, 1968, *Spatial Analysis*, New York: Prentice Hall Inc., Englewood Cliff.
- Biro Pusat Statistik, 1990, *Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 1990*, Jakarta : BPS.
- Cadwallader, Martin T., 1985, *Analytical Urban Geography, Spatial Pattern and Theories*, New Jersey : Prentice Hall Inc, Englewood Cliff.
- Chanond, Chantana, 1987, Recent Change in the Land Market on the Urban Fringe of Bangkok, *ITC Journal*, 1987-3 : 211-221.
- Coffey, William J., 1981, *Geography, to Ward a General Spatial System Approach*, London : Methuen & Co Ltd.
- Czamanski, Stanislaw, 1966, Effects of Public Assesment of Assesments Land Values, in *Journal American Institute of Planner*, XXXII No.4.
- Hagget, Peter, 1983, *Geography a Modern Synthesis*, New York : Harper and Row.
- Hammond, Charles Whyne, 1985, *Elements of Geography*, London : McDonald and Evans Ltd.
- Hudson, F.R.G.S., 1974, *A Geography of Settlement*, London : McDonald and Evans Ltd.
- Jayadinata, Johara T., 1986, *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Lichfield, N. and H.D. Drapkin, 1980, *Land Policy in Planning*, London : George Allen & Unwin.

- Mustafa, Zainal, 1986, *Pengantar Statistik Terapan Untuk Ekonomi*, Yogyakarta : Penerbit Fakultas Ekonomi UII.
- Nas, Peter J.M., 1986, *The Indonesian City*, in *Studies In Urban Development and Planning*, Holland : Foris Publication.
- Northam, Ray.M, 1979, *Urban Geography*, New York : John Wiley & Sons.
- Rondinelli, D.A., 1983, *National Secondary Cities in Developing Countries : Policy for Diffusing Urbanization*, Beverly Hill : SAGE.
- , 1990, *Policies for Balanced Urban Development in Asia: Concept and Reality*, Regional Development Dialogue.
- Supranto, J., 1981, *Metode Ramalan Kuantitatif untuk Perencanaan*, Jakarta: Penerbit Gramedia.
- World Bank, 1991, *Urban Policy and Economic Development: An Agenda for the 1990s*, a World Bank Policy Paper, Washington D.C.
- Yeates, Maurice, 1965, Some Factors Affecting the Spatial Distribution of Chicago Land Values, in *Economic Geography*, XLI No. 1.
- Yunus, Hadi Sabari, 1980, *Perkembangan Kota dan Faktor-Faktornya*, Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.